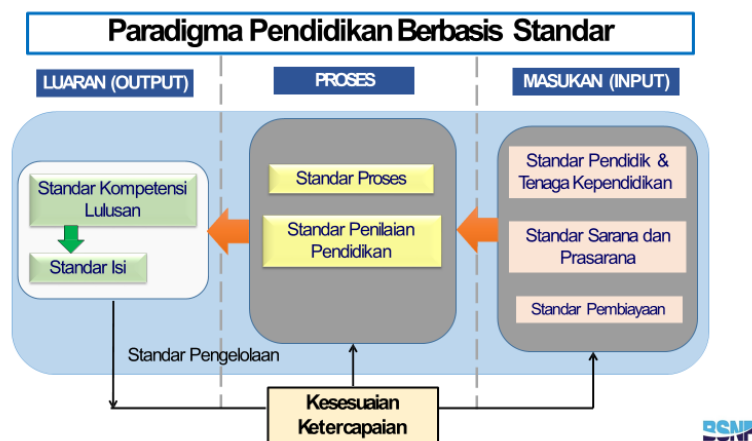


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekolah harus menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi. Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional maka perlu adanya standar sebagai acuan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.



Gambar 1. Paradigma Pendidikan Berbasis Standar

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ada 8 aspek yang harus dipenuhi sekolah untuk menjaga mutu pendidikan nasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan yg tertuang pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan,

dan standar penilaian pendidikan. Gambar paradigma pendidikan berbasis standar dapat dilihat pada halaman sebelumnya.

Standar sarana prasarana merupakan Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung kegiatan praktikum siswa maka sarana dan prasarana di bengkel kerja, studio, maupun laboratorium harus tersedia dengan baik. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, terlebih lagi untuk SMK yang dominan pelajarannya berupa praktikum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik
2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat satu.

Serta dalam PP No. 19 tahun 2005 BAB IV ayat 1 dan 2 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana yang menyatakan bahwa :

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Dan setiap satuan pendidikan meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat olahraga, dan tempat ibadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan tempat yang lain yang

diperlukan menunjang proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah, pada kenyataannya sekolah masih belum bisa memenuhinya karena beberapa persoalan. Beberapa persoalan sarana dan prasarana (fasilitas) yang terjadi di dunia pendidikan tergambar sebagai berikut : Ketua BAN-S/M Toni Toharudin memaparkan (14/12/2018) , hasil analisis pemenuhan standar nasional menyebutkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras harus menjadi perhatian bersama. Sebab untuk jenjang SD/MI dibawah nilai rata-rata standar baik untuk sekolah dengan sasaran baru maupun reakreditasi. Capaian untuk PTK di sekolah sasaran baru 71,7 dan sarpras 69,7. Untuk sekolah reakreditasi capaian PTKnya 81 dan sarpras 76,4. Untuk jenjang SMA pada sasaran baru capaian pemenuhan standar PTK sebesar 69,5 dan sarpras sebesar 69. Demikian juga dengan sekolah re-akreditasi capaian pemenuhan standar PTK sebesar 80,8 dan sarpras sebesar 83,8.

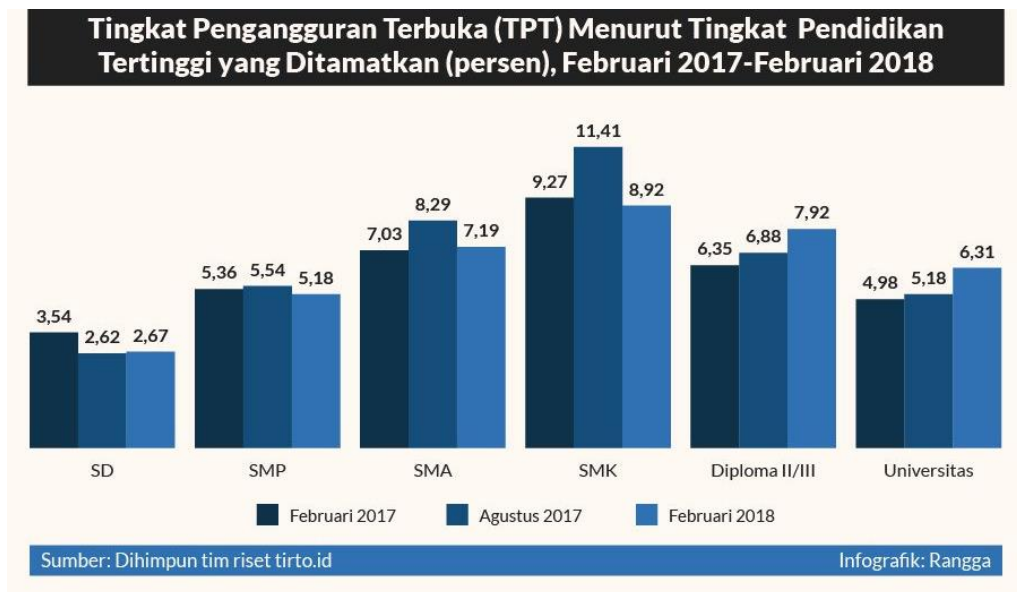
Sebanyak 12 SMA/MA terpaksa menumpang ke sekolah lain untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal itu disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana komputer untuk mengerjakan soal ujian. "Ada 12 sekolah, masing-masing 9 SMA dan 3 MA yang menumpang di sekolah lain," kata Kepala Balai Dikmen Sleman Disdikpora DIY, Sukarjo, ditemui di sela-sela peninjauan pelaksanaan UNBK hari pertama di SMAN 1 Depok, Sleman, Senin (9/4/2018). Menurutnya, belasan sekolah itu terpaksa menumpang karena tidak memiliki ruangan sekaligus perangkat komputer yang memadai untuk menggelar UNBK. Meski ujiannya menumpang, namun ia memastikan seluruh siswa telah dibekali cara mengerjakan UNBK.

Dari permasalahan permasalahan di atas kita ketahui masih ada kendala tentang pemberlakuan standar sarana prasarana dalam dunia pendidikan saat ini. Pada kenyataannya belum semua lembaga pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang prestasi

belajar siswanya serta meningkatkan mutu proses pembelajaran yang ada disekolah. Namun pemerintah selalu berupaya untuk selalu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dari semua jenjang pendidikan yang ada. Begitupula dari pihak sekolah selalu berupaya melengkapi sarana dan prasarana belajar yang ada agar peserta didik dapat meningkatkan prestasinya secara maksimal dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pemberlakuan standar sarana prasarana pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan khususnya SMK yang dimana sarana prasarana sangat penting dalam menunjang pembelajaran.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan merupakan sekolah vokasi yang mempunyai peranan penting untuk menyiapkan tenaga yang siap pakai baik secara industri ataupun skala mikro seperti usaha kecil menengah (UKM). Tujuan SMK diatur oleh peraturan pemerintah No.29 tahun 1990 yaitu mengutamakan penyiapan siswa untuk masuk di dunia kerja serta mengembangkan sikap professional. Sayangnya meskipun punya sejarah yang panjang tujuan dari SMK belum tercapai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2018 adalah sebanyak 133,94 juta orang. Adapun angka tersebut meningkat 2,39 juta dari jumlah angkatan kerja pada Februari 2017. Apabila dirinci lebih lanjut, angka sebesar 133,94 juta orang itu terdiri dari 127,07 juta orang yang merupakan penduduk bekerja, sedangkan 6,87 juta orang dikategorikan sebagai pengangguran. Berdasarkan data BPS itu, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah yang tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain. Besarannya mencapai 8,92 persen. <https://tirto.id/mengapa-pengangguran-terbanyak-justru-lulusan-smk-cJ6Y>



Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira penyebab tingginya pengangguran lulusan SMK karena pasar tenaga kerja di Indonesia memiliki kesenjangan pada aspek keahlian. Menurutnya, keahlian yang dihasilkan dari lulusan lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu perlu adanya perombakan kurikulum pada tataran SMK. Selain memperbanyak praktikum dan meningkatkan keahlian pada hal-hal yang berkaitan dengan digital, Bhima menilai pentingnya pengembangan model pemagangan.

Pemerintah sudah berupaya dalam menurunkan tingkat pengangguran SMK yaitu dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dengan kualitas pembelajaran yang baik maka siswa akan memperoleh keterampilan dasar, kemampuan untuk berpikir kritis. Selain itu siswa juga akan memahami nilai-nilai dan karakter untuk menjadi warga yang produktif dan pembelajar. Selain itu juga perbaikan infrastruktur sarana prasarana di SMK, perbaikan sarana prasarana diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Untuk mengukur capaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan (SKL) maka diselenggarakan Ujian Nasional (UN).

Ujian Nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan UNBK untuk memperluas jangkauan pelaksanaan UN. Pemerintah menggagas ujian nasional berbasis komputer (UNBK) demi mewujudkan pendidikan yang setara. Selain itu UNBK juga bertujuan untuk meningkatkan literasi terhadap TIK dan menciptakan sistem evaluasi kualitas SDM yang berintegritas.

Di bawah ini merupakan data hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di SMK Muhammadiyah 1 Bantul (<https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>) gambar nilai UNBK SMK Muhammadiyah 1 Bantul bisa dilihat pada halaman selanjutnya. Mata pelajaran UNBK yang diuji yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi Kejuruan. Hasil dari data UNBK menunjukkan semua mata pelajaran mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Nilai rata rata tahun 2015 menunjukkan 62,69 pada tahun 2016 menurun menjadi 59,18 dan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 55,79.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Bantul beralamat di Jl. Parangtritis Km. 12 Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. SMK Muhammadiyah 1 Bantul memiliki empat kompetensi

keahlian, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Pemesinan (TP), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik Audio Video (TAV). SMK Muhammadiyah 1 Bantul terdiri dari tiga unit untuk pembelajaran siswa dan satu unit untuk usaha. Unit 1 untuk kegiatan pembelajaran normatif, adaptif, teori produktif dan kegiatan pembelajaran kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Unit 2 untuk pembelajaran praktik produktif Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Unit 3 untuk pembelajaran praktik produktif Teknik Pemesinan (TP) dan Unit 4 untuk Teknik Audio Video (TAV) usaha dalam bidang jasa perbaikan kendaraan ringan dan las.

Detail Sekolah 20400383 - SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL			
Mata Pelajaran	2017	2016	2015
Bahasa Indonesia	69.07	69.41	73.02
Bahasa Inggris	40.04	49.84	50.73
Matematika	39.49	42.50	47.91
Kompetensi Kejuruan	74.57	74.97	79.08
Rerata	55.79	59.18	62.69
IIUN	UNBK	UNBK	71.78

Gambar 3. Nilai UNBK SMK Muhammadiyah 1 Bantul

SMK Muhammadiyah 1 Bantul sudah menerapkan kurikulum 2013. Dalam pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lingkup jurusan Teknik Pemesinan, didapatkan hasil bahwa, pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh para guru. Sebagian guru menyebutkan bahwa Kurikulum 2013 mudah untuk diterapkan, lebih baik dan efektif untuk digunakan, namun ada guru menyebutkan bahwa Kurikulum 2013 kurang pas apabila diterapkan pada mata pelajaran bersifat praktek karena pelajaran praktek sulit diterapkan dengan metode pembelajaran scientific approach, project based learning, discovery learning. Selain itu dalam menerapkan kurikulum 2013 tentu perlunya sarana praktik yang memadai untuk menunjang dalam keberlangsungan

kegiatan belajar mengajar khususnya pada pelajaran praktik pemesinan. Untuk itu diperlukan sarana praktik yang cukup sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013 agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya capaian sarpras di semua jenjang pendidikan
2. Belum terpenuhinya sarpras untuk mengadakan UNBK di SMA/SMK Yogyakarta
3. Rendahnya nilai UNBK di SMK Muhammadiyah 1 Bantul khususnya pada mata pelajaran kompetensi kejuruan
4. Belum diketahuinya kesesuaian sarana praktik terhadap kebutuhan kurikulum 2013 di SMK Muhammadiyah 1 Bantul.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, sebagai pembatasan masalah peneliti memilih identifikasi masalah pada nomor 2 dengan alasan jika identifikasi masalah nomor 2 di selesaikan maka diharapkan akan menyelesaikan beberapa masalah yang sudah dijabarkan di indentifikasi masalah. Maka penelitian ini dibatasi pada “Kesesuaian sarana praktik untuk penerapan Kurikulum 2013 kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Bantul”. Dalam penelitian ini akan mengacu pada Peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Nasional Sarana Prasarana Sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dan juga Kurikulum 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian sarana praktik pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Bantul dengan peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2008

tantang Standar Nasional Sarana Prasarana Sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan?

2. Bagaimana penerapan kurikulum 2013 dengan kondisi sarpras di SMK Muhammadiyah 1 Bantul?

3. Bagaimana kesesuaian Standar sarana untuk kebutuhan UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) dengan kondisi sarana UKK di SMK Muhammadiyah 1 Bantul ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian sarana praktik pemesinan SMK Muhammadiyah 1 Bantul dengan Standar Nasional Sarana Prasarana Pendidikan

2. Mengetahui penerapan kurikulum 2013 dengan kondisi sarpras di SMK Muhammadiyah 1 Bantul

3. Mengetahui Standar sarana untuk kebutuhan UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) dengan kondisi sarana UKK di SMK Muhammadiyah 1 Bantul

F. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Teoritis

a) Memberikan sumbangan terhadap perkembangan pengetahuan khususnya untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UNY.

b) Sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian sejenis tentang kesesuaian prasarana berdasarkan PERMENDIKNAS No.40 Tahun 2008 untuk pembelajaran praktek pemesinan.

2. Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana latihan dan pengembangan wawasan dalam penerapan ilmu ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah terkait.

b) Bagi Sekolah

Sebagai salah satu bahan evaluasi pada kompetensi keahlian Teknik Pemesinan yang sekarang berjalan, dan sebagai bahan pertimbangan apabila akan dibuka kembali pendaftaran siswa pada kompetensi keahlian tersebut.

c) Bagi Guru

Yakni sebagai bahan masukan dan memotivasi guru untuk lebih meningkatkan kinerja, kreativitas, dan variasi selama proses belajar mengajar.

d) Bagi Siswa,

Dapat menampung aspirasi siswa terkait kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sarana atau kelengkapan serta ketersediaan fasilitas praktik sekolah.